

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM.

1. Definisi.

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

2. Klasifikasi.

Pendapatan dan Beban Transfer diklasifikasikan seperti berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Pendapatan Transfer	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil	SKPKD
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU)	SKPKD
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	SKPKD
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	SKPKD
	Dana Insentif Daerah	SKPKD
	Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	SKPKD
	Bantuan Keuangan	SKPKD
Beban Transfer	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Desa	SKPKD
	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa	SKPKD
	Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	SKPKD
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	SKPKD

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistem akuntansi transfer, fungsi akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
 - 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Bendahara Penerimaan SKPKD.
Dalam sistem akuntansi transfer, Bendahara Penerimaan SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku Penerimaan SKPKD; dan
 - 2) membuat SPJ penerimaan.
- c. Bendahara Pengeluaran SKPKD.
Dalam sistem akuntansi transfer, Bendahara Pengeluaran SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku Pengeluaran SKPKD;
 - 2) membuat SPJ pengeluaran;
 - 3) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 4) memeriksa kas secara periodik;
 - 5) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 6) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 7) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi transfer adalah:

- a. PMK; dan/atau
- b. Perpres; dan/atau
- c. keputusan kepala daerah; dan/atau
- d. dokumen yang dipersamakan antara lain Perjanjian dan Berita Acara.

D. JURNAL STANDAR

a. Transfer Masuk

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Cukai/SDA dari Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil Pajak/Cukai/SDA merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak/cukai/SDA.

Pada saat Pemerintah Daerah menerima pencairan dana bagi hasil pajak/cukai/SDA dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak/Cukai/SDA ... - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak/Cukai/SDA.....		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK (Kurang Bayar) dari Pemerintah Pusat dan/atau surat pemberitahuan/Keputusan Kepala Daerah (Kurang Bayar) dari Pemerintah Provinsi terkait penetapan jumlah dana bagi hasil pajak/cukai/SDA yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan penetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Dana Transfer Umum-DBH - Pajak/Cukai/SDA...	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak/Cukai/SDA..... LO		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima dana bagi hasil pajak/cukai/SDA atas PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Pajak/Cukai/SDA...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak/Cukai/SDA		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK Lebih Bayar dari Pemerintah Pusat terkait penetapan jumlah dana bagi hasil pajak/cukai/SDA yang akan diterima oleh Pemerintah

Daerah, maka berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak/Cukai/SDA LO	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah membayar dana bagi hasil pajak/cukai/SDA atas PMK Lebih Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Debit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

2) Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Pada saat Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ... LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK (Kurang Bayar) dari Pemerintah Pusat

(Kurang Bayar) terkait ketetapan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Dana Alokasi Umum (DAU) atas PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK Lebih Bayar dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)LO	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah membayar Dana Alokasi Umum (DAU) atas PMK Lebih Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Debit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan (fisik) dan kebutuhan belanja operasionalnya (non-fisik).

Pada saat Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi khusus dengan bukti pemindah bukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non-Fisik - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non-Fisik		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK (Kurang Bayar) dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non-Fisik	XXX	
		XXX	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non-Fisik		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) atas PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non-Fisik		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non-Fisik		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK Lebih Bayar dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non-FisikLO	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah membayar Dana Alokasi Khusus (DAK) atas PMK Lebih Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Debit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

4) Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat Pemerintah Daerah menerima pencairan dana insentif daerah dengan bukti pemindah bukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Insentif Daerah (DID) - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Insentif Daerah (DID)		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK (Kurang Bayar) dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah Dana Insentif Daerah (DID) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	XXX	
		XXX	Dana Insentif Daerah (DID)		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Dana Insentif Daerah (DID) atas PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Insentif Daerah (DID)		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK Lebih Bayar dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah Dana Insentif Daerah (DID) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD

akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Insentif Daerah (DID) LO	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah membayar Dana Insentif Daerah (DID) atas PMK Lebih Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Debit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Transfer Keluar.

1) Transfer Bagi Hasil

Transfer bagi hasil merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa bagi hasil.

Pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang transfer bagi hasil, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bagi Hasil	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bagi Hasil		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima. Berdasarkan SP2D tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bagi Hasil	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bagi Hasil	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

2) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima. Berdasarkan SP2D tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO